

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi di era globalisasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik komunikasi satu arah maupun komunikasi dua arah, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan kebutuhan informasi yang semakin berkembang (Dewi, 2021). Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Manusia secara individu perlu berkomunikasi satu sama lain di ruang publik.

Komunikasi publik didefinisikan oleh Judy Pearson dan Paul Nelson (Dewi, 2021) sebagai proses penggunaan pesan untuk menciptakan makna bersama dalam situasi dimana sumber menyampaikan pesan tersebut kepada sejumlah penerima yang kemudian memberikan umpan balik baik berupa pesan ataupun tidak, komunikasi verbal atau berupa tanya jawab. Secara sederhana dalam komunikasi publik ada sumber, pesan, penerima dan diantara ketiganya ada yang disebut dengan interferensi. Kunci komunikasi publik adalah pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan diterima secara utuh. Namun tidak menutup kemungkinan dalam proses penyampaian pesan sering terjadi kesalahpahaman atau gangguan terhadap pesan yang lebih sering disebut *hoax*.

Komunikasi publik merupakan hal yang penting dalam sebuah pemerintahan. Implementasi kebijakan tentang pengelolaan komunikasi publik yang telah dibuat perlu di sosialisasikan ke masyarakat luas. Komunikasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, berbagi informasi dan pemuas kebutuhan sosial sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan. Tujuan umum dari komunikasi publik adalah untuk memberi informasi kepada sejumlah besar orang mengenai organisasi atau instansi

misalnya mengenai kegiatan dan hasil capaian dari instansi tersebut. Selain itu komunikasi publik juga bertujuan untuk menjalin hubungan antara instansi dengan masyarakat diluar instansi.

Proses komunikasi publik biasanya menggunakan media massa dalam penyebarannya. Dalam hal ini informasi yang bersifat publik harus adanya transparansi. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan dalam mengakses informasi publik melalui berbagai media massa seperti koran, televisi, media online, website pemerintah, dan juga media sosial. Untuk memenuhi kebutuhan akan keterbukaan informasi publik, pemerintah melakukan salah satu usaha dengan meningkatkan transparansi keterbukaan informasi publik pada semua Lembaga, sesuai instruksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008) .

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan program pemerintah yang berkaitan dengan: 1) pengambilan keputusan mengenai kepentingan umum; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan badan publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik; dan 5) mengetahui alasan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, terutama untuk memperoleh layanan informasi yang berkualitas (Nababan, 2020)

Badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang mengelola informasi menggunakan aplikasi terintegrasi, yaitu informasi setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan. Keterbukaan informasi dapat mendorong badan publik untuk menyelenggarakan negara

dengan baik, transparan, efektif dan efisien serta akuntabel, sehingga lembaga penyiaran publik atau PPID dapat menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, sehingga PPID dapat memberikan pelayanan yang baik kepada khalayak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PPID terdapat di semua kabupaten atau kota diseluruh provinsi di Indonesia termasuk Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Asahan dibentuk berdasarkan surat keputusan Bupati Asahan Nomor 299 Kominfo Tahun 2017 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Terdiri dari PPID utama dan pembantu. PPID utama bertanggung jawab kepada sekretaris daerah sebagai atasan dengan pertimbangan dari kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Asahan.

Dengan demikian masyarakat Kabupaten Asahan telah mendapat legitimasinya secara yuridis untuk mendapatkan hak-hak dalam memperoleh informasi dari badan-badan publik. Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten Asahan memanfaatkan webportal ashankab.go.id sebagai media keterbukaan informasi publik paling efektif yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. Dengan adanya webportal diharapkan dapat memudahkan masyarakat Asahan dalam mengakses informasi publik baik yang berkaitan dengan aktifitas pemerintahan maupun layanan informasi lainnya.

Pada dasarnya website pemerintah menyediakan kemudahan bagi warga untuk mengakses layanan informasi pemerintah dengan perangkat elektronik. Sebagaimana pendapat Rosenbaum (2011), website dapat membantu instansi pemerintah untuk

meningkatkan legitimasi dengan membuatnya terlihat transparan, terbuka untuk berbagi pembuatan kebijakan publik dengan para pemangku kepentingan, lebih efektif karena kecerdasan baru dan kemitraan baru, dan utamanya lebih bertanggung jawab pada publik yang dilayaninya (Muallidin dkk., 2020).

Kabupaten Asahan sendiri pada tahun 2020 menempati posisi kelima dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Asahan sebanyak 796.960 jiwa termasuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap. pada Agustus 2023 kemarin, Kabupaten Asahan menerima Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Kabupaten/Kota Informatif yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumatera Utara. Kegiatan yang bertujuan mewujudkan Badan Publik yang terbuka dan inovatif dalam Pelayanan Informasi guna mewujudkan *Good Government*. Keterbukaan Informasi Publik tidak berhenti, tidak cukup pada hal-hal yang sifatnya teknis administratif dan konsep yang prosedural, namun harus bermanfaat, terimplementasikan pada pelayanan yang ada, yang harus dimiliki oleh seluruh Badan Publik di Provinsi. Kabupaten Asahan mendapat pujian atas keterbukaannya informasi publik bagi masyarakat setempat melalui webportal PPID Asahan. <https://portal.asahankab.go.id> dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Asahan.

Berdasarkan observasi sementara peneliti, PPID Kabupaten Asahan merupakan salah satu PPID yang aktif memberikan informasi kepada publik. hal tersebut dapat dilihat pada webportal ppid.asahan.go.id dimana terdapat 479 dokumen informasi publik, 66 permohonan informasi publik dengan total 633 unduhan oleh masyarakat. dari data

tersebut menunjukkan bahwa PPID Asahan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik sesuai peraturan uud nomor 14 tahun 2008. Hal tersebut juga sesuai dengan Keputusan Bupati Asahan nomor 283-Kominfo-Tahun 2017.

Dari latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Informasi Kepada Publik”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pada penelitian ini memfokuskan pada strategi komunikasi yang digunakan PPID dalam memberikan informasi publik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi komunikasi PPID pemerintah kabupaten Asahan dalam memberikan informasi kepada publik?

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian ini mempunyai sasaran yang tepat. Adapun tujuan dari peneltian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi komunikasi PPID pemerintah kabupaten Asahan dalam memberikan informasi kepada publik.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis

1. Menambah khasanah keilmuan khususnya strategi Komunikasi PPID Pemerintah Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Informasi Publik.

2. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama berkuliah di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh.
3. Bagi Program Studi ilmu Komunikasi, sebagai bahan informasi dan sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.5.2 Manfaat Secara Praktis

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan, perbandingan dan penelitian yang relevan.
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh.